



# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT  
INVESTIGASI IV

NOMOR : OT.04/LAP- 2 /D504/2023  
TANGGAL 9 JANUARI 2023

## KATA PENGANTAR

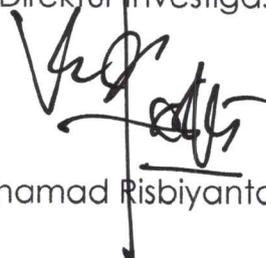
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Direktorat Investigasi IV dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Direktorat Investigasi IV beserta seluruh jajarannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dan pertanggungjawaban Direktorat Investigasi IV kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku pemberi mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan di masa yang akan datang, serta peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di Lingkungan Direktorat Investigasi IV.

Jakarta, 3 Januari 2023

Plt. Direktur Investigasi IV *h*

  
Mohamad Risbiyantoro

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil pengukuran kinerja kegiatan Direktorat Investigasi IV atas tujuh sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 16 indikator kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa 12 indikator kinerja kegiatan telah mencapai target.

1. Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik sebesar 23 K/L atau mencapai 383,33% dari target sebesar 6 K/L.
2. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik sebesar 16 Pemda atau mencapai 20,25% dari target sebesar 79 Pemda.
3. Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK sebesar 23 K/L atau mencapai 383,33% dari target sebesar 6 K/L.
4. Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK sebesar 78 Pemda atau mencapai 98,73% dari target sebesar 79 Pemda.
5. Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.
6. Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan Edukatif sebesar 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80%.
7. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan sebesar 87,86 atau mencapai 117,15% dari target sebesar 75.
8. Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi sebesar 1 layanan atau mencapai 100% dari target sebesar 1 layanan.
9. Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan sebesar 2 inovasi layanan atau mencapai 200% dari target sebesar 1 inovasi layanan.
10. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) sebesar 84,88% atau mencapai 121,26% dari target sebesar 70%.
11. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.
12. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai sebesar 100% atau mencapai 200% dari target sebesar 50%.

13. Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.
14. Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan sebesar 83,33% atau mencapai 83,33% dari target sebesar 100%.
15. Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu sebesar 50% atau mencapai 50% dari target sebesar 100%.
16. Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.

Faktor pendukung capaian kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Tim auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan pengawasan represif, preventif, dan edukatif sehingga dapat menyelesaikan penugasan dan penyelesaian laporan dengan tepat waktu.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Investigasi IV untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern unit kerja dan melakukan inovasi layanan yang berdampak pada percepatan penugasan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Data dan informasi yang diperoleh tidak lengkap sehingga informasi pengawasan tidak dapat difindaklanjuti.
2. Jumlah SDM kurang memadai untuk melaksanakan Sistem Manajemen Anti Suap sebagai mitigasi atas risiko pegawai menerima suap.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak eksternal dan internal dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mendukung tugas dan fungsi.
3. Pengembangan pengawasan intern dengan menggunakan teknologi informasi.

4. Memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang harus diambil yang menyangkut pemecahan masalah program prioritas pemerintah.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Tugas dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis Organisasi .....	4
D. Kegiatan dan Layanan Produk.....	5
E. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
A. Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	13
1. Ringkasan Kinerja .....	13
2. Uraian Kinerja .....	15
B. Akuntabilitas Keuangan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022 .....	60
B. Rencana Tindak Tahun 2023.....	60
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 205, Direktorat Investigasi IV mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Investigasi mengimplementasikan kebijakan teknis pengawasan, melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, dan evaluasi kegiatan bidang investigasi dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja serta pengembangan kapabilitas bidang investigasi, melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan forensik digital, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi bidang investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 205, Direktorat Investigasi IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengkajian, perumusan, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi, dan pedoman pengawasan bidang investigasi;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, serta pelaporan hasil pengawasan dan kinerja bidang investigasi;
3. Pelaksanaan forensik digital dan pemberian keterangan ahli;
4. Pelaksanaan kajian informasi awal, pengelolaan, dan pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Investigasi; dan
6. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

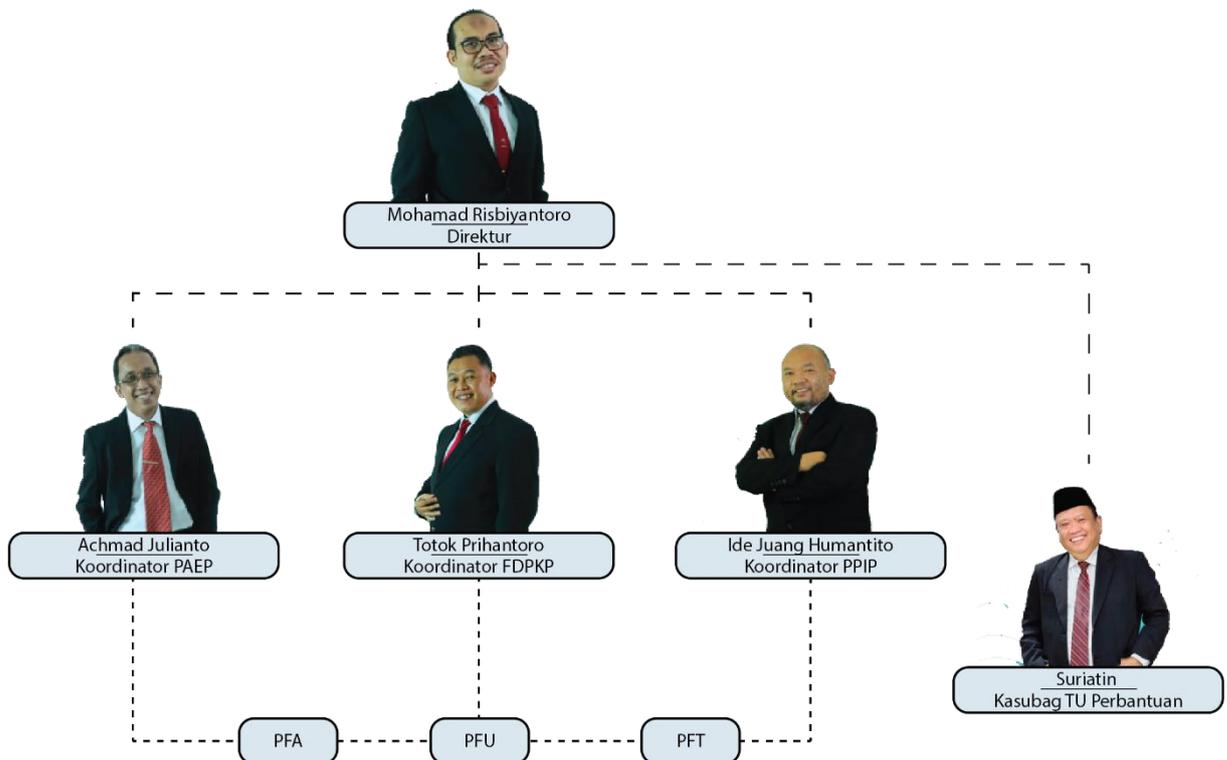
## B. Struktur Organisasi

Direktorat Investigasi IV terdiri dari:

1. Koordinator Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi;
2. Koordinator Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi;
3. Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Pengawasan Bidang Investigasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan dengan Bagan berikut:

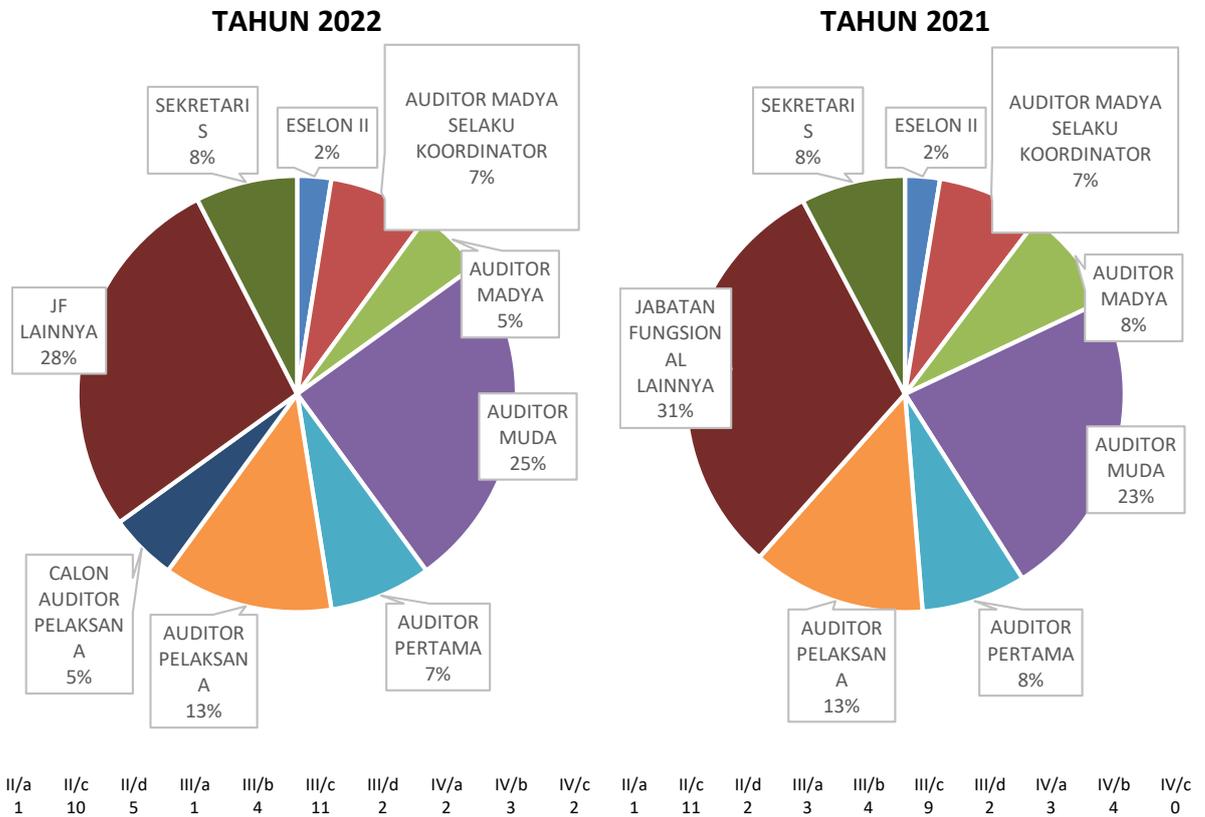
**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Direktorat Investigasi IV**



Jumlah pegawai Direktorat Investigasi IV per 31 Desember 2022 sebanyak 32 orang.

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan jabatan tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Jumlah dan Klasifikasi Direktorat Investigasi IV



### C. Aspek Strategis Organisasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP.

Dengan terbitnya PP ini, cakupan penugasan BPKP semakin luas dan terjadi perubahan paradigma yang lebih mengedepankan pencegahan melalui pembangunan suatu sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan/penyimpangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menyatakan bahwa BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi.
3. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor MoU-3/K/D5/2021 dan NK-154/1.02/PPATK/03/2021 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana tanggal 18 Maret 2021.

MoU ini akan menjadi landasan bagi PPATK dan BPKP dalam melaksanakan kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kerja sama dengan PPATK, akan mendukung pengawasan yang dilakukan BPKP agar semakin efektif dan memberikan manfaat untuk PPATK dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* yaitu Data Analitik dan Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) atau *Digital Forensics* yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

## D. Kegiatan dan Layanan Produk

Kegiatan dan layanan produk Direktorat Investigasi IV meliputi:

1. Pengumpulan dan Pengevaluasian Data Elektronik atau Komputer Forensik (PEBDE)

PEBDE merupakan suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti dari piranti komputer atau media digital lainnya, agar dapat dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan.

2. *Data Analytics*

*Data analytics* merupakan proses pengolahan dan analisis data digital. *Data analytics* kerap kali dikaitkan dengan proses meramu bahan dasar guna melakukan pengambilan keputusan dan mencari solusi permasalahan. *Data analytics* acap kali melibatkan proses pembersihan data, transformasi data, pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu, dan pembuatan model untuk menemukan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

3. Pemberian Keterangan Ahli di Bidang Komputer Forensik

Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

4. Penilaian Risiko Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

Penilaian risiko HKP adalah penilaian atas atribut-atribut yang dapat mengendalikan sumber risiko HKP yang berkaitan dengan kordinasi, kolaborasi, regulasi, data, *moral hazard*, dan perubahan lingkungan.

5. Pengembangan Informasi Awal

Pengembangan informasi awal yaitu proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi data dan informasi mengenai indikasi kecurangan atau hambatan kelancaran pembangunan dalam rangka menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawasan bidang investigasi. Hasil pengembangan informasi awal digunakan sebagai bahan

pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan pengawasan bidang investigasi didasarkan pada hasil pengembangan informasi awal. Pengembangan informasi awal dilakukan dengan melakukan telaah dan/atau penelitian investigatif awal.

6. Peningkatan Kompetensi Auditor

Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, karena itu auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain.

7. *Fraud Risk Assessment (FRA)*/Penilaian Risiko Kecurangan

FRA atau penilaian risiko kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.

8. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaduan masyarakat menjadi sarana yang penting untuk menjadi *trigger* (pemicu) bagi perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan, namun hal ini harus bisa dikelola dengan baik. Atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Deputi Bidang Investigasi, dilakukan penelaahan untuk dapat diputuskan tindak lanjutnya.

## **E. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Direktorat Investigasi IV selama Tahun 2022 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang merupakan komitmen Diektorat Investigasi IV untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi tugas dan fungsi organisasi.

Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian umum mengenai tugas dan fungsi Direktorat Investigasi IV, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk, serta sistematika laporan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Berisi uraian singkat mengenai target kinerja tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi uraian mengenai capaian kinerja tahun 2022, analisis efisiensi, dan akuntabilitas keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian singkat kesimpulan kinerja tahun 2022 dan rencana tindak tahun 2023

### **Lampiran**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sasaran program/kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja program/kegiatan, dan rencana capaiannya.

Direktorat Investigasi IV menetapkan target kinerja yang terdiri dari dua sasaran kegiatan dan enam indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Direktorat Investigasi IV tahun 2020 sampai dengan 2024 pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Target Kinerja Direktorat Investigasi IV**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan1: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif					
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sasaran Kegiatan2: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif					
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi					
IKK 1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	-	75	77	78	79



Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2: Nilai SAKIP Unit Kerja	80,00	80,00	82	83	84
IKK 3: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	-	65,00%	-	-	-
IKK 4: Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	-	100.00%	-	-	-
IKK5: Indeks Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	70	75	80	81	82

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen ini berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Target dari indikator kinerja sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing kegiatan. Perjanjian Kinerja Direktorat Investigasi IV Tahun 2022 terdapat pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Direktorat Investigasi IV**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
				Satuan	Jumlah
1.	Pengawasan atas EPK K/L/D	1.1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	6
		1.2	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	79
		1.3	Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	K/L	6
		1.4	Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	Pemda	79
2.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	2.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persen	100,00
3.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	3.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif	Persen	100,00
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	4.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	75,00
		4.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00
		4.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan	Jumlah	1,00



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
				Satuan	Jumlah
			dampak terhadap percepatan		
5.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi	5.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70,00
		5.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100,00
6.	Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputi Bidang Investigasi	6.1	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	50,00
		6.2	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100,00
7.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Investigasi	7.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100,00
		7.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100,00
		7.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100,00



**Tabel 2.2**  
**Anggaran Kegiatan Direktorat Investigasi IV**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Pengawasan Investigasi IV	1.885.917.000,00
II	Program Dukungan Manajemen	1.399.483.000,00
III	Pengembangan Laboratorium Forensik	25.839.146.000,00
	Jumlah	29.124.546.000,00

Anggaran untuk pengembangan laboratorium forensik merupakan anggaran untuk *Training Information Technology*, peningkatan kapabilitas dan kompetensi forensik, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal *software*.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 1. Ringkasan Kinerja

Pada tahun 2022, Direktorat Investigasi IV menetapkan tujuh sasaran kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan terdapat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1.**  
**Ringkasan Kinerja Direktorat Investigasi IV Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>I Pengawasan atas EPK K/L/D</b>						
1.1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	6	23	383,33	
1.2	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	79	16	20,25	
1.3	Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	K/L	6	23	383,33	
1.4	Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	Pemda	79	78	98,73	
<b>II Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif</b>						
2.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persen	100,00	100,00	100,00	
<b>III Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif</b>						

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
3.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan Edukatif	Persen	80,00	100,00	125,00	★
<b>IV Meningkatkan Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi</b>						
4.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	75,00	87,86	117,15	★
4.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00	1	100,00	★
4.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan	Jumlah	1,00	2	200,00	★
<b>V. Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi</b>						
5.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70,00	84,88	121,26	★
5.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100,00	100,00	100,00	★
<b>VI. Meningkatkan Kualitas Manajemen SDM pada Deputi Bidang Investigasi</b>						
6.1	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	50,00	100,00	200,00	★
6.2	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	★

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>VII</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Investigasi</b>					
7.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100,00	83,33	83,33	
7.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	50,00	50,00	
7.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:



= mencapai/ melampaui target



= belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu



= belum mencapai target

## 2. Uraian Kinerja

### Sasaran Kegiatan 1

#### Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, Direktorat Investigasi IV menjadi penanggung jawab Agenda Prioritas Pengawasan topik "Pengendalian Kecurangan". Pengendalian korupsi pada instansi pemerintah dilakukan melalui peningkatan kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan

penanganan kejadian korupsi. Pengelolaan risiko korupsi akan mencakup tiga rerangka yang saling terkait satu sama lain, yakni (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai pembentuk budaya organisasi antikorupsi, (2) rerangka pengelolaan, yang dimulai dari komitmen pimpinan puncak dan bahwa pengelolaan sebagai siklus yang terus bergerak maju melalui proses pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus, dan (3) strategi cegah-deteksi-respons yang menjadi satu-kesatuan yang harus ada.

Untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan ini, Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP melakukan kegiatan peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada K/L/P.

IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Deputi Bidang Investigasi melaksanakan kegiatan peningkatan IEPK pada K/L/P, disesuaikan dengan *Area of Improvement* (Aoi) masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK.

Kegiatan peningkatan IEPK dapat dilaksanakan dengan metode pengawasan bidang investigasi antara lain *Fraud Risk Assessment* (FRA), konsultasi pengendalian kecurangan, *Coaching Clinic* Pengawasan Bidang Investigasi (CCPBI), Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), audit investigatif, dan Audit dengan Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI).

Skor IEPK merupakan komposit skor atas tiga pilar, yaitu kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian. Skor IEPK diperoleh pada saat dilakukan pada saat melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup penilaian secara terintegrasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas

Pengendalian Korupsi (IEPK). Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, unsur penilaian dan pembobotan IEPK adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pembobotan IEPK**

Pilar	Bobot
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48%
Penerapan Strategi Pencegahan	36%
Penanganan Kejadian Korupsi	16%
Jumlah	100%

Pengukuran kondisi untuk setiap indikator melalui pemberian skor dalam skala 1 s.d. 5.

- 1) Skor 1 adalah kondisi manakala kebijakan belum ada atau ada tetapi masih sebatas formalitas belaka.
- 2) Skor 2 adalah kondisi manakala kebijakan ada dan telah terdiseminasi, tetapi terimplementasi secara parsial saja dan/atau belum konsisten.
- 3) Skor 3 adalah kondisi manakala unit kerja telah mengimplementasi kebijakan secara utuh, sistematis, dan menyeluruh meskipun belum diikuti pemantauan dan evaluasi terjadwal dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan dan apakah perbaikan benar-benar dilakukan
- 4) Skor 4 diberikan pada suatu indikator ketika aktivitas pemantauan dan evaluasi telah dilakukan terjadwal dan konsisten dan perilaku antikorupsi mulai menjadi budaya. Pada skor 4 ini telah diyakini kegiatan-kegiatan antikorupsi telah membawa perubahan pada organisasi
- 5) Skor 5 diberikan untuk kondisi yang paling ideal (substansial-optimal).

Skor 5 diberikan jika kondisi benar-benar telah ideal. Kebijakan dan sistem antikorupsi telah bertransformasi menjadi norma sosial. Perilaku antikorupsi telah menjadi perilaku kolektif, bukan individual dan sistem antikorupsi telah memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan kinerja pencapaian tujuan organisasi.

Nilai IEPK dikategorikan “baik” apabila skor penilaian minimal 3,00.

Upaya peningkatan IEPK didahului dengan identifikasi *Area of Improvement* (Aoi). Hasil identifikasi Aoi antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan penetapan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
- 2) Meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
- 3) Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal;
- 4) Penilaian risiko korupsi;
- 5) Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, serta melaksanakan upaya-upaya pengelolaan risiko korupsi.

Kegiatan peningkatan IEPK disesuaikan dengan Aoi masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK. Selama tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan IEPK sebanyak 81 penugasan di 78 pemerintah daerah dan tiga Kementerian/ Lembaga.

Hasil pengawasan BPKP melalui penilaian IEPK menunjukkan bahwa pengendalian korupsi pada K/L/D di Indonesia masih belum memadai. Jumlah K/L yang nilai IEPK telah mencapai skor 3,00 sebanyak 23 K/L. Jumlah Pemda nilai IEPK telah mencapai skor 3,00 sebanyak 16 Pemda, terdiri dari 7 Pemprov dan 9 Pemkab/Pemkot. Hal ini menunjukkan 23 K/L dan 16 Pemda telah mengimplementasi kebijakan secara utuh,

sistematis, dan menyeluruh meskipun belum diikuti pemantauan dan evaluasi terjadwal dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan dan apakah perbaikan benar-benar dilakukan.

Target dan realisasi kinerja sasaran kegiatan “Pengawasan atas EPK K/L/D” terdapat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Pengawasan atas EPK K/L/D**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	K/L	6	23	383,33	
1.2	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	79	16	20,25	
1.3	Jumlah K/L yang menindaklanjuti Aol dari Hasil Pengukuran EPK	K/L	6	4	66,67	
1.4	Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Aol dari Hasil Pengukuran EPK	Pemda	79	81	102,53	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Pengawasan atas EPK K/L/D” ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

- 1.1 Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.
- 1.2 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.
- 1.3 Jumlah K/L yang menindaklanjuti Aol dari Hasil Pengukuran EPK.

1.4 Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Aol dari Hasil Pengukuran EPK.

Uraian kinerja atas 4 (empat) indikator sebagai berikut:

### 1.1 Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

**Pada Tahun 2022, jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik atau mencapai skor penilaian minimal 3,00 sebanyak 23 K/L, yaitu:**

**Tabel 3.4**  
**Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik**  
**Tahun 2022**

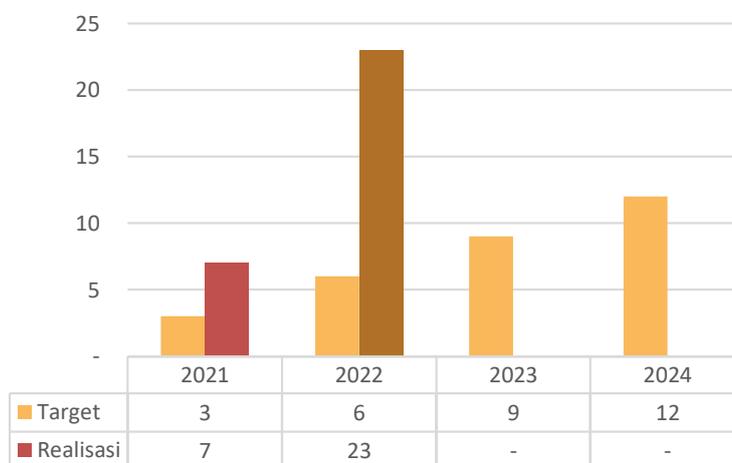
No.	Pemda	Skor IEPK
1	Kementerian Keuangan	3,000
2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf)	3,000
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,000
4	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	3,000
5	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	3,000
6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3,000
7	Kementerian Sekretariat Negara	3,000
8	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	3,000
9	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	3,000
10	Kementerian Kesehatan	3,000
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,000
12	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	3,000
13	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB	3,000
14	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,000
15	Mahkamah Konstitusi (MK)	3,000
16	Ombusman Republik Indonesia	3,000
17	Dewan Ketahanan Nasional	3,000

No.	Pemda	Skor IEPK
18	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	3,000
19	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3,000
20	Kementerian Agama	3,000
21	Kementerian Dalam Negeri	3,000
22	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	3,000
23	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	3,000

Realisasi target IKK Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 sebanyak 23 K/L lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 7 K/L, dan lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 12 K/L.

Perbandingan realisasi IKK Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 dengan target tahun 2024 disajikan pada grafik 3.1 berikut:

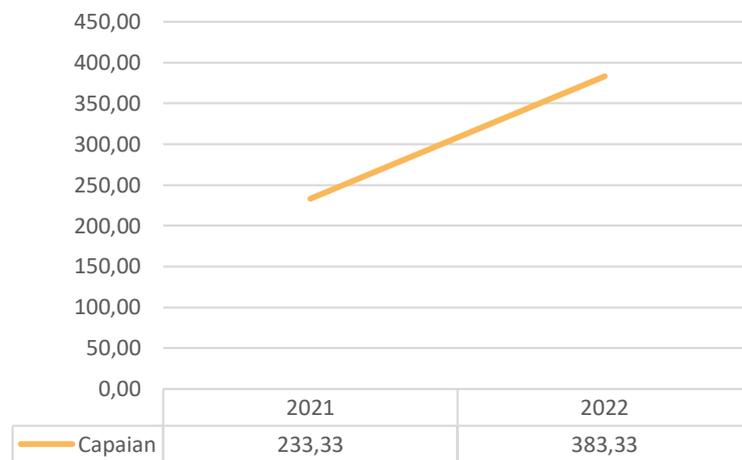
**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Realisasi**  
**IKK Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik**  
**Tahun 2022 dibandingkan dengan Target 2021-2024**



Dari grafik 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan.

Perkembangan capaian IKK Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2021 dan tahun 2022 digambarkan dengan Grafik 3.2.

**Grafik 3.2**  
**Capaian IKK Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi baik Tahun 2021 s.d. 2022**



Dari Grafik 3.2 terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

## 1.2 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

Pada Tahun 2022, jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik atau mencapai skor penilaian minimal 3,00 sebanyak 16 Pemda terdiri dari 7 Pemprov dan 9 Pemkab/Pemkot.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik Tahun 2022**

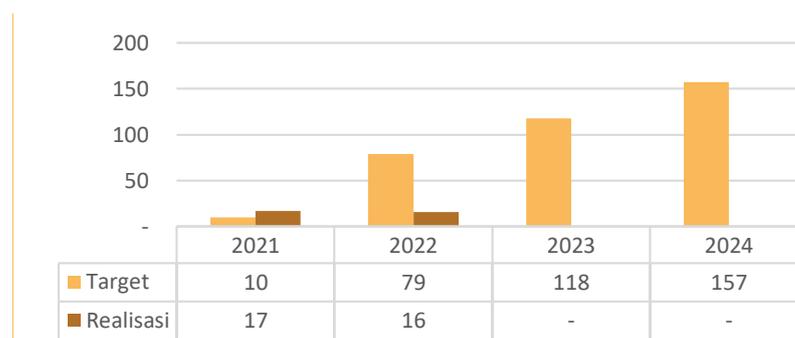
No.	Pemda	Skor IEPK
Pemerintah Provinsi		
1	Provinsi Sumatera Utara	3,000
2	Provinsi Jawa Tengah	3,000
3	Provinsi DI Yogyakarta	3,136
4	Provinsi Bali	3,120
5	Provinsi Kepulauan Riau	3,000
6	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,000

No.	Pemda	Skor IEPK
7	Provinsi Banten	3,000
Pemerintah Kabupaten/Kota		3,000
8	Kabupaten Batubara	3,000
9	Kabupaten Cilacap	3,000
10	Kabupaten Magelang	3,000
11	Kabupaten Sleman	3,000
12	Kabupaten Minahasa Tenggara	3,000
13	Kabupaten Maros	3,000
14	Kabupaten Tangerang	3,000
15	Kabupaten Halmahera Barat	3,000
16	Kabupaten Asahan	3,000

Realisasi target IKK Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 sebanyak 16 Pemda lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 17 Pemda, dan lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 157 Pemda.

Perbandingan realisasi IKK Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 dengan target tahun 2024 disajikan pada grafik 3.3 berikut:

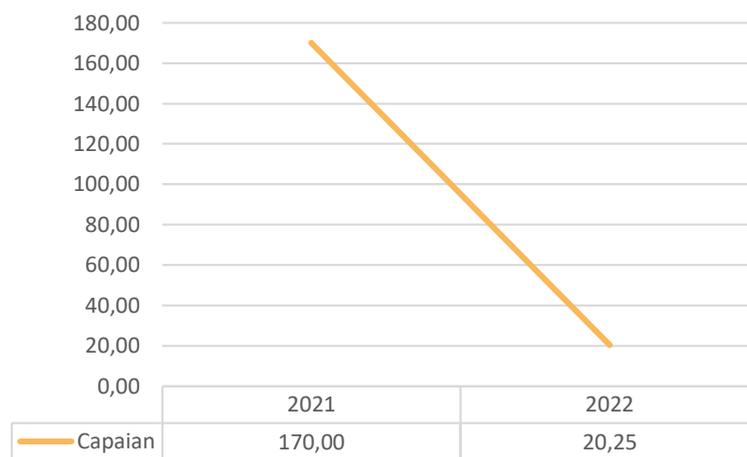
**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Realisasi**  
**IKK Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik**  
**Tahun 2022 dengan Target 2021-2024**



Dari grafik 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan, namun realisasi tahun 2022 kurang dari target yang telah ditetapkan.

Perkembangan capaian IKK Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2021 dan tahun 2022 digambarkan dengan Grafik 3.4.

**Grafik 3.4**  
**Capaian IKK Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik**  
**Tahun 2021 s.d. 2022**



Dari Grafik 3.4 terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

### 1.3 Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK

Dari hasil identifikasi *Area of Improvement* (Aoi) masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK pada K/L. Unit kerja melaksanakan kegiatan peningkatan IEPK disesuaikan dengan Aoi) masing-masing pilar/indikator penilaian IEPK. Selanjutnya BPKP akan melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil pelaksanaan peningkatan IEPK pada K/L.

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Investigasi melakukan kegiatan peningkatan IEPK pada 4 (empat) K/L, yaitu:

- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Kejaksaan Agung RI.
- 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Aol yang dijumpai pada K/L antara lain:

1) Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi

K/L kerja telah melakukan identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko korupsi yang teridentifikasi (Skor 2).

2) Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel

K/L telah menyelenggarakan sistem *whistleblowing* internal namun tidak ada bukti saluran pelaporan berfungsi dan dimanfaatkan, dan sikap terhadap pelapor masih cenderung negatif dan niat *whistleblowing* cenderung rendah (Skor 2).

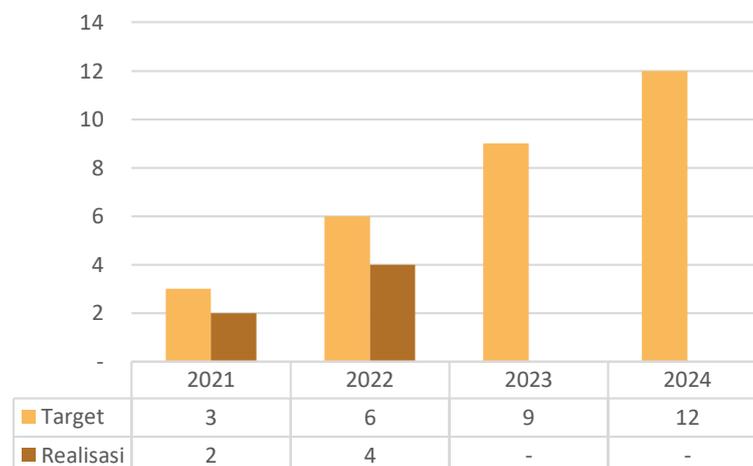
Tindak lanjut K/L atas saran dari BPKP, sebagai berikut:

1) Menyusun draft Penilaian Risiko Kecurangan (FRA).

2) Menyusun draft kebijakan/pedoman Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) di lingkungan K/L.

Realisasi Jumlah K/L yang menindaklanjuti Aol dari hasil pengukuran EPK sebanyak 4 K/L atau mencapai 66,67% dari target sebanyak 6 K/L.

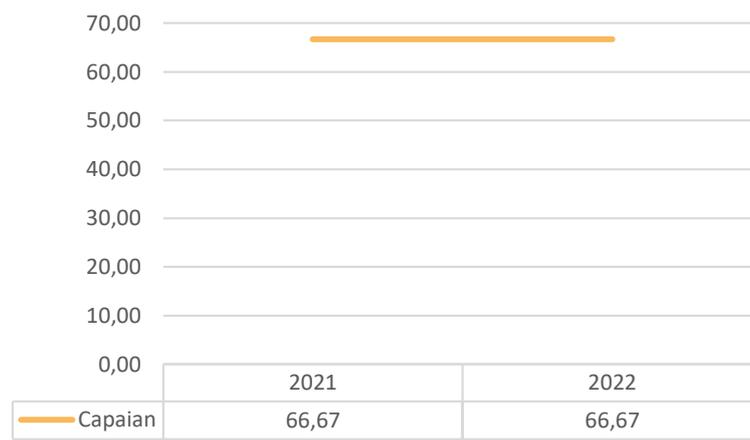
**Grafik 3.5**  
**Perbandingan Realisasi**  
**IKK Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK**  
**Tahun 2022 dengan Target 2021-2024**



Dari grafik 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022 kurang dari target yang telah ditetapkan.

Perkembangan capaian IKK Jumlah K/L yang menindaklanjuti Aol dari hasil pengukuran EPK tahun 2021 dan tahun 2022 digambarkan dengan Grafik 3.6.

**Grafik 3.6**  
**Capaian IKK Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK Tahun 2021 s.d. 2022**



Dari Grafik 3.6 terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021.

#### **1.4 Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Aol dari hasil pengukuran EPK**

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Investigasi melakukan kegiatan peningkatan IEPK pada 81 Pemda.

Aol yang dijumpai pada Pemda antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum dilakukan penetapan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi.
- 2) Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah.
- 3) Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan.

- 4) Penilaian risiko korupsi belum dilakukan.
- 5) Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan.
- 6) Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan dari sisi eksistensi maupun implementasinya.

Atas Aol yang dijumpai, BPKP memberikan saran perbaikan antara lain:

- 1) Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK.
- 2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
- 3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi.
- 4) Mengoptimalkan fungsi *whistleblowing system*.
- 5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian *Fraud* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak terulang.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK.
- 2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.

## Sasaran Kegiatan 2

### Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif

Pengawasan Bidang Investigasi yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi. Pengawasan keinvestigasian yang berorientasi represif bertujuan untuk mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Pelaksanaan penugasan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi.

Pencapaian sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif diukur dengan menggunakan satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil

pengawasan represif. Target kinerja Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif pada tahun 2021 adalah sebesar 100,00%. Penugasan pengawasan represif yang dimaksud yaitu:

- 1) Pengumpulan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE)
- 2) Pemberian Keterangan Ahli Forensik Komputer
- 3) Penelitian Awal

Realisasi indikator kinerja Persentase K/L/P/BU dan/atau APH yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2022 sebesar 100,00%. Target dan capaian kinerja sasaran kegiatan pengawasan bidang investigasi yang berorientasi represif terdapat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi IKK Persentase K/L/P/BU yang Menindaklanjuti Hasil**  
**Pengawasan Represif**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persen	100,00	100,00	1000,00	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Faktor penghambat capaian kinerja adalah data dan informasi yang diperoleh tidak lengkap sehingga hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan K/L/P/BU dan APH.
- 2) Meningkatkan kompetensi auditor keinvestigasian.

Laporan hasil pengawasan represif yang mendukung capaian indikator kinerja Persentase K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dapat dilihat pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Hasil Pengawasan Represif yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan oleh K/L/P/BU Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan ditindaklanjuti	Capaian (%)
1.	Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik	5	5	100,00
2.	Pemberian Keterangan Ahli	4	4	100,00
3.	Penelitian Awal	5	5	100,00
	Jumlah	14	14	100,00

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021 dan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik 3.5.

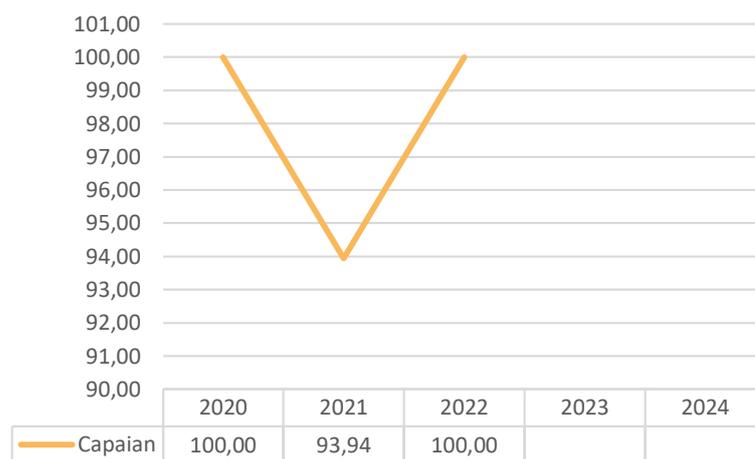
**Grafik 3.5**  
**Target dan Realisasi IKK Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target 2020-2024**



Dari grafik 3.5 terlihat realisasi kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan sama dengan target tahun 2024 sebesar 100,00%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 s.d tahun 2022 disajikan pada grafik 3.6.

**Grafik 3.6**  
**Capaian IKK Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti**  
**Tahun 2020 s.d 2022**



Dari Grafik 3.6 terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021.

*Output* yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif terdapat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Output yang Mendukung IKK Persentase K/L/P/BU yang**  
**menindaklanjuti Pengawasan Represif**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Laporan	Capaian (%)
1.	Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik	5	5	100
2.	Pemberian Keterangan Ahli	3	4	133,33
3.	Penelitian Awal	4	5	125,00
	Jumlah	12	14	116,67

Aktivitas-aktivitas pengawasan yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil dan turunannya.
- 2) Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dalam rangka mendukung ADTT Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
- 3) Pemberian Keterangan Ahli bidang forensik digital dalam rangka penyidikan kasus Dugaan Penyimpangan Pengajuan dan Pencairan Klaim Dana BPJS Kesehatan Medan pada Rumah Sakit Mitra Sejati Medan Tahun 2014 s.d. 2018.
- 4) Penelitian awal atas Tata Niaga Industri Baja terkait Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- 5) Penelitian Awal Penyelesaian Sengketa Lahan Eks Lanud Polonia Medan.

Capaian IKK persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif sebesar 100,00% didukung dengan dana sebesar Rp251.843.575,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp266.654.000,00 serta OH sebanyak 624 OH atau 99,68% dari rencana sebanyak 626 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif tercapai secara efisien. Hal

ini terlihat dari capaian *outcome* sebesar 100%, lebih besar daripada penggunaan dana sebesar 94,45%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif tercapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *outcome* sebesar 100%, lebih besar daripada penggunaan OH sebesar 99,68%.

### Sasaran Kegiatan 3

#### Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif

Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi antara lain melalui *Fraud Risk Assessment* (FRA) dan identifikasi risiko hambatan kelancaran pembangunan.

Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur.

Pencapaian sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif diukur dengan menggunakan satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif. Target kinerja Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00%.

Penugasan pengawasan yang berorientasi preventif dan edukatif yang dimaksud antara lain:

- 1) Penilaian Risiko Kecurangan.
- 2) Penilaian Risiko Hambatan Kelancaran Pembangunan.
- 3) *Workshop* Peningkatan Kompetensi.

Realisasi nilai Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebesar 100,00%. Target dan capaian kinerja sasaran kegiatan pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif dan edukatif terdapat pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi IKK Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil**  
**pengawasan preventif dan edukatif**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif	Persen	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target antara lain didukung oleh tim auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan pengawasan preventif dan edukatif, sehingga dapat menyelesaikan penugasan dan penyelesaian laporan dengan tepat waktu.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengawasan preventif dan edukatif, seperti mengikutsertakan auditor dalam kegiatan pencegahan korupsi seperti *Fraud Risk Assessment (FRA)*.

- 2) Melakukan upaya peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dilakukan secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

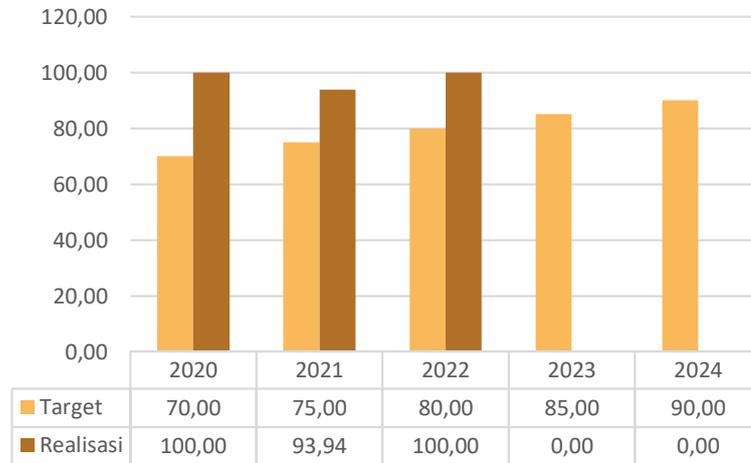
Laporan hasil pengawasan preventif dan edukatif yang mendukung capaian indikator kinerja Persentase K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif dapat dilihat pada tabel 3.10.

**Tabel 3.10**  
**Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Ditindaklanjuti/**  
**Dimanfaatkan oleh K/L/P/BU**  
**Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan ditindaklanjuti	Capaian (%)
1.	Penyusunan Profiling Risiko	14	14	100,00
2.	<i>Workshop</i> Keinvestigasian	20	20	100,00
3.	Kajian HKP	1	1	100,00
4.	Penilaian Risiko HKP	1	1	100,00
5.	Laporan PAEP	6	6	100,00
	Jumlah	41	41	100,00

Perbandingan realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif tahun 2022 dibandingkan realisasi tahun 2021 dan target tahun 2024 disajikan pada grafik 3.7.

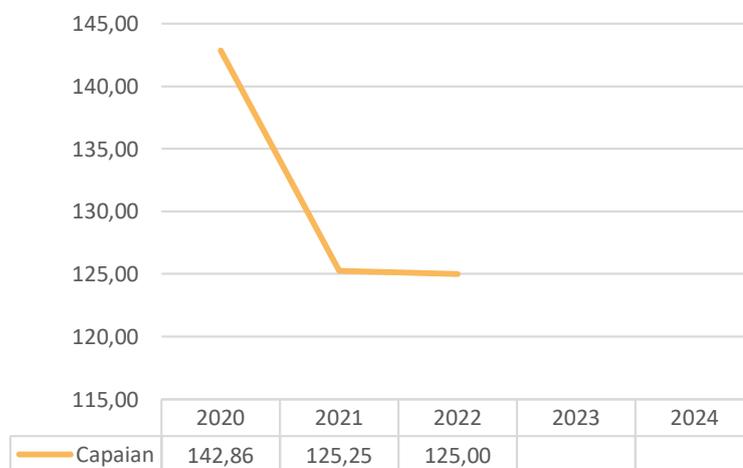
**Grafik 3.7**  
**Perbandingan Realisasi IKK Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2022 dibandingkan dengan Target 2020-2024**



Dari grafik 3.7 terlihat realisasi kinerja tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 90,00%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 s.d tahun 2022 disajikan pada grafik 3.8.

**Grafik 3.8**  
**Capaian IKK Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Tahun 2020 s.d 2022**



Dari Grafik 3.8 terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2021, namun lebih dari 100%.

*Output* yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif terdapat pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Output yang Mendukung IKK Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti Pengawasan Preventif dan Edukatif Tahun 2022**

No	Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Capaian (%)
1.	Penyusunan Profil Risiko Kecurangan	19	14	73,68
2.	Workshop Keinvestigasian	3	20	666,67
3.	Kajian HKP	1	1	0,00
4.	Penilaian Risiko HKP	1	1	100,00
5.	Laporan PAEP	8	6	75,00
	Jumlah	32	41	183,07

Capaian sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif didukung dengan dana sebesar Rp668.858.000,00 atau 93,57% dari anggaran sebesar Rp625.827.173,00 dan indikator *output* kegiatan (IOK) sebanyak 41 laporan atau 183,07% dari rencana sebanyak 32 laporan, serta OH sebanyak 109 OH atau 68,55% dari rencana sebanyak 159 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *outcome* sebesar 125%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 93,57%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian *outcome* sebesar 125,00%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 68,55%.

#### Sasaran Kegiatan 4

#### Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi

Sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya, maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang bersifat "enablers", yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola Deputi Bidang Investigasi.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP. Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola Deputi Bidang Investigasi terdapat pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi</b>					
4.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	75	87,86	117,15	★
4.2	Jumlah Layanan Eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	1	100,00	★
4.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan	Jumlah	1	2	200,00	★

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
	dampak terhadap percepatandan peningkatan kualitas layanan					

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

#### 4.1 Indikator Kinerja Kegiatan 1

##### Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan. Pengukuran indeks dilakukan menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada penggunaan layanan (*stakeholders*). Skor indeks merupakan hasil akumulasi unsur-unsur penilaian kepuasan atas layanan, yang terdiri dari:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana
- 7) Perilaku pelaksana
- 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- 9) Sarana dan prasarana

Target kinerja Indeks Kualitas Layanan Eksternal pada tahun 2022 sebesar 75,00 dari indeks skala 100.

Berdasarkan hasil survei kepuasan layanan kepada 61 responden yang merupakan mitra yang menerima layanan Direktorat Pengawasan diperoleh hasil Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan sebesar 87,86 dengan predikat "Baik".

**Tabel 3.13**  
**Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan**

No.	Unsur Pelayanan	Indeks Kepuasan (Nilai Interval)	Skor Indeks Kepuasan (Nilai Interval Konversi)	Mutu Layanan	Predikat Layanan
1	Persyaratan	3,61	90,16	A	Sangat baik
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,57	89,34	A	Sangat baik
3	Waktu penyelesaian	3,31	82,79	B	Baik
4	Biaya/tariff	3,51	87,70	B	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,54	88,52	A	Sangat baik
6	Kompetensi pelaksana	3,59	89,75	A	Sangat baik
7	Perilaku pelaksana	3,69	92,21	A	Sangat baik
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	3,48	86,89	B	Baik
9	Sarana dan prasarana	3,66	91,93	A	Sangat baik

Nilai Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan ini melampaui target tahun 2022 sebesar 75,00 atau mencapai 117,15%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah kompetensi auditor dalam memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung percepatan layanan.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja adalah dengan terus meningkatkan layanan dan kerja sama dengan *stakeholders*, serta meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Investigasi.

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Kualitas Eksternal Direktorat Pengawasan Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	Indeks Skala 100	75,00	87,86	117,15	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

#### 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan 2

##### **Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi**

Deputi Bidang Investigasi telah memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholders* dengan membangun Laboratorium Komputer Forensik untuk membantu mendapatkan bukti dokumen elektronik. Pengguna layanan adalah Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, APIP, maupun BPKP.

Terdapat dua aktivitas yang dilaksanakan, yaitu *digital forensic* dan *digital investigation*. *Digital forensic* adalah pengumpulan informasi/bukti audit dari media digital yang digunakan dalam

proses bisnis auditan. Sementara itu, *digital investigation* adalah kegiatan investigasi terhadap rangkaian data digital yang relevan dengan permasalahan yang diaudit.

Target indikator “Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi” pada tahun 2022 sebanyak 1, realisasi 1 atau mencapai 100%.

**Tabel 3.15**  
**Target dan Realisasi IKK Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	1	100,00	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

#### 4.3 Indikator Kinerja Kegiatan 2

##### **Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan**

Dalam rangka memberikan percepatan dan peningkatan kualitas layanan internal BPKP, Deputi Bidang Investigasi memanfaatkan teknologi informasi berupa:

- 1) Aplikasi *database* hasil pengawasan bidang investigasi.  
Aplikasi ini dibuat untuk menyimpan dan menampilkan data hasil pengawasan bidang Investigasi BPKP Perwakilan/Pusat yang sudah ditelaah oleh Rendal dimulai dari data umum sampai dengan hasil pengawasan antara lain temuan, penyebab, rekomendasi, dan nilai temuannya. Data hasil

pengawasan yang diinput pada aplikasi ini dimanfaatkan antara lain untuk penyusunan laporan kinerja, laporan hasil penugasan bidang investigasi, dan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

*Database* Hasil Pengawasan Bidang Investigasi dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. *Database* Hasil Pengawasan untuk penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Pemberian Keterangan Ahli, dan penugasan lain selain penugasan ke HKP an.
- b. *Database* Hasil Pengawasan untuk penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim

## 2) Aplikasi *Fraud Risk Assessment* (FRA)

Aplikasi FRA digunakan oleh Perwakilan BPKP dan Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk melakukan input hasil identifikasi risiko *fraud* atas topik pengawasan dalam Agenda Prioritas Pengawasan.

Target indikator “Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan” pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu), realisasi 2 (dua) atau mencapai 200%.

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi IKK Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	2	200,00	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

### Sasaran Kegiatan 5

#### Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi

Manajemen Risiko sudah harus diterapkan di seluruh instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk kegiatan antara lain mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko berupa identifikasi risiko dan analisis risiko, serta menyusun sistem informasi yang mendukung pelaporan atas penilaian risiko secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai respon untuk mewujudkan *Good Governance* ditetapkan sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi”.

Capaian kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola Deputi Bidang Investigasi terdapat pada tabel 3.17.

**Tabel 3.17**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi</b>					
5.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70,00	84,88	121,26	
5.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100,00	100,00	100,00	

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Uraian kinerja atas dua indikator kinerja meningkatnya kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi sebagai berikut:

### 5.1 Indikator Kinerja Kegiatan 1

#### Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Indikator Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) diukur berdasarkan jumlah risiko unit kerja yang termitigasi dibandingkan dengan jumlah risiko unit kerja (berdasarkan aplikasi bewise) dikali 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) sebesar 84,88% atau mencapai 121,00% dari target tahun 2022. Realisasi kinerja ini diperoleh dengan menghitung jumlah risiko termitigasi sebanyak 73 risiko dibagi dengan jumlah

risiko teridentifikasi sebanyak 86 risiko pada aplikasi bewise dikali 100%.

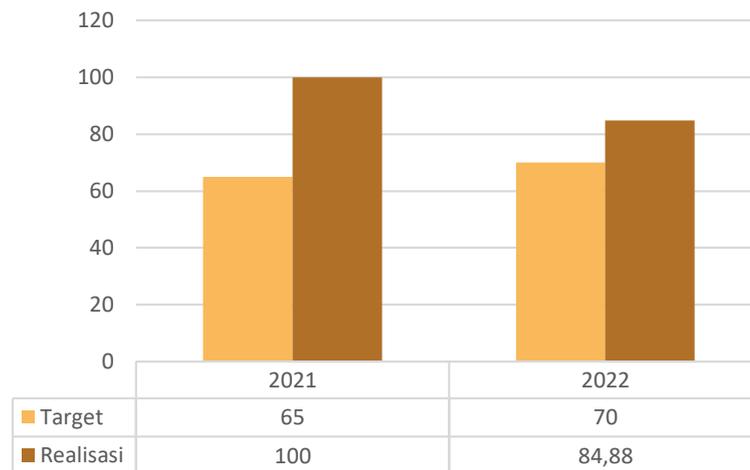
Target dan realisasi Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern tahun 2022 disajikan pada tabel 3.18.

**Tabel 3.18**  
**Target dan Realisasi**  
**Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)**  
**Tahun 2022**

No.	Tahun	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	65	100	153,85
2	2022	70	84,88	121,26

Perbandingan realisasi target dan realisasi kinerja tahun 2022 disajikan pada grafik 3.9.

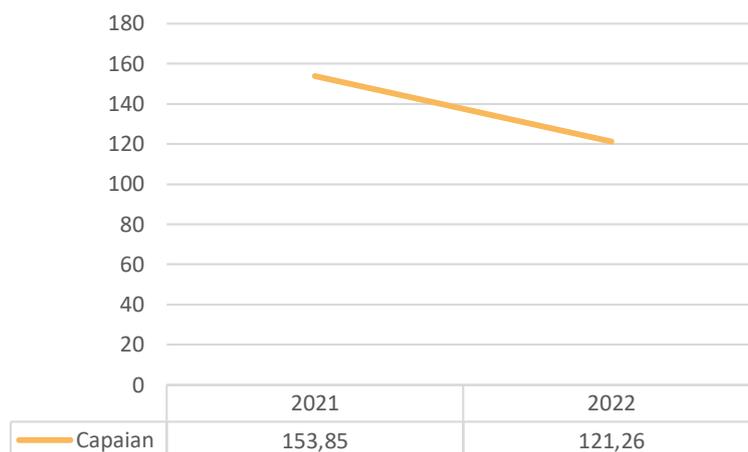
**Grafik 3.9**  
**Target dan Realisasi Indikator Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)**  
**Tahun 2022**



Dari grafik 3.9 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 84,88% telah melebihi target tahun 2022 sebesar 70%.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern tahun 2021 s.d. 2022 digambarkan dengan Grafik 3.10.

**Grafik 3.10**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Efektivitas Pengendalian Intern**  
**Tahun 2021 s.d 2022**



Dari grafik 3.10 dapat dilihat capaian Persentase Efektivitas Pengendalian Intern tahun 2022 di atas 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah komitmen Deputy Bidang Investigasi untuk terus meningkatkan tiap-tiap unsur atau komponen penilaian maturitas SPIP dalam rangka perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja adalah terus melakukan pengkomunikasian kebijakan, peningkatan komitmen implementasi SPIP, dan peningkatan dokumentasi.

## **5.2 Indikator Kinerja Kegiatan 2**

### **Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)**

Manajemen Risiko Indeks (MRI) Unit Kerja adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Unit Kerja yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) diukur dengan menghitung jumlah rencana tindak pengendalian yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah rencana tindak pengendalian dikali 100,00%. Target kinerja Persentase

Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00%.

Realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebesar 100,00%. Realisasi kinerja ini diperoleh dengan menghitung jumlah rencana tindak pengendalian yang dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) rencana tindak pengendalian dibagi dengan jumlah rencana tindak pengendalian sebanyak 7 (tujuh) rencana tindak pengendalian pada aplikasi bewise dikali 100%.

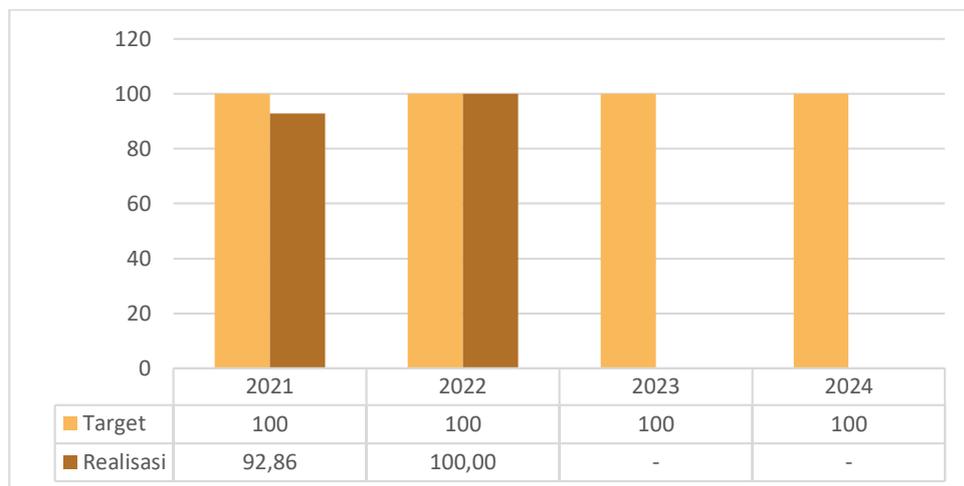
Target dan realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian RTP tahun 2021 s.d 2022 disajikan pada tabel 3.19.

**Tabel 3.19**  
**Target dan Realisasi**  
**Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)**  
**Tahun 2021 s.d 2022**

No.	Tahun	Persentase Efektivitas Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	100	92,86	92,86
2	2022	100	100,00	100,00

Perbandingan realisasi target dan realisasi kinerja tahun 2022 disajikan pada grafik 3.11.

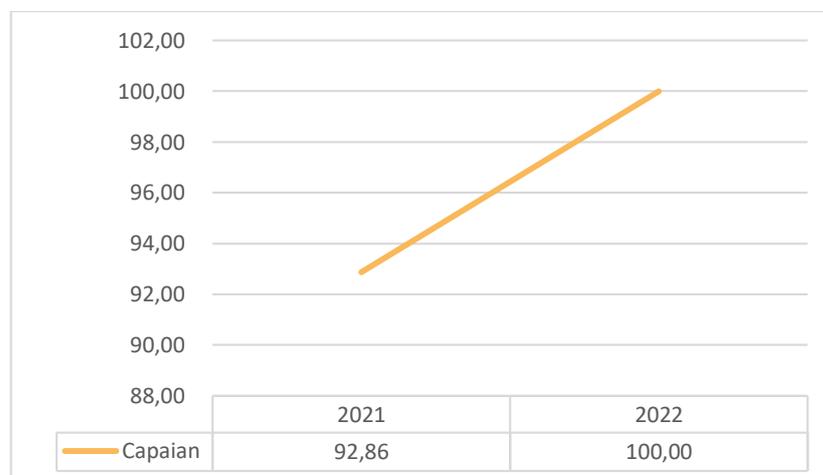
**Grafik 3.11**  
**Target dan Realisasi Indikator Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)**  
**Tahun 2022 dibandingkan dengan Target 2021-2024**



Dari grafik 3.11 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan sama dengan target tahun 2024.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2021 s.d. 2022 digambarkan dengan Grafik 3.12.

**Grafik 3.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian RTP**  
**(MRI Unit Kerja) Tahun 2021 s.d 2022**



Dari grafik 3.12 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Faktor pendukung capaian kinerja adalah seluruh pegawai Deputy Bidang Investigasi mendukung implementasi manajemen risiko.

Strategi/rencana tindak peningkatan capaian kinerja adalah meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang pentingnya implementasi manajemen risiko.

### Sasaran Kegiatan 6

#### Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputy Bidang Investigasi

Sasaran meningkatnya kualitas manajemen SDM pada Deputy Bidang Investigasi terdiri atas dua indikator kegiatan, yaitu Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai dan Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai.

**Tabel 3.20**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputy Bidang Investigasi Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputy Bidang Investigasi</b>					
6.1	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	50,00	100,00	200,00	★
6.2	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100,00	100,00	100,00	★

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Penjelasan atas dua indikator di atas adalah sebagai berikut:

### **6.1 Indikator Kegiatan 1**

#### **Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai**

Indikator kegiatan persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai tercapai 100% dari target sebesar 100,00%. Sejak tahun 2021 hingga 2022, tidak ada pegawai pada Deputi Bidang Investigasi yang mendapatkan sanksi/hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat.

Realisasi IKK persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai sebesar 100,00% atau mencapai 200,00% dari target sebesar 50,00%.

### **6.2 Indikator Kegiatan 2**

#### **Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai**

Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, karena itu auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas serta meminimalisir gugatan hukum, pegawai di lingkungan Deputi Bidang Investigasi mengikuti pengembangan kompetensi antara lain melalui pelatihan kantor sendiri, *workshop*, dan diklat.

Direktorat Investigasi IV selaku Direktorat yang membidangi SDM, mengkoordinir kegiatan peningkatan kompetensi. Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi sebanyak 124 orang terdiri dari:

- 1) Pejabat struktural sebanyak 5 orang.
- 2) Auditor sebanyak 97 orang.
- 3) Fungsional lainnya sebanyak 22 orang.

Pada tahun 2022, pegawai yang mengikuti diklat dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta
1	Diklat JFA (Auditor Terampil)	10 orang
2	Diklat Substansi	150 orang

Dari diklat tersebut, terdapat beberapa diklat diikuti oleh hampir seluruh pegawai, Deputi Bidang Investigasi, yaitu:

- 1) Pelatihan MOOC Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) (82 pegawai).
- 2) Pelatihan MOOC Internalisasi Agenda Prioritas Pengawasan (APP) bagi Auditor di Lingkungan BPKP (95 pegawai).
- 3) Pelatihan MOOC Nilai-nilai Perilaku Berakhlak dalam Penerapan Budaya Kerja di BPKP (124 pegawai).

Realisasi IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/ pegawai sebesar 100% atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%

### Sasaran Kegiatan 7

#### Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi

Sasaran meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Bidang Investigasi terdiri atas tiga indikator kegiatan, yaitu:

- 7.1 Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan.
- 7.2 Persentase dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu.
- 7.3 Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja.

**Tabel 3.21**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>VII Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi</b>						
7.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100,00	100,00	83,33	
7.2	Persentase dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	50,00	50,00	
7.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100,00	100,00		

Keterangan:

-  = mencapai/ melampaui target
-  = belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibanding tahun lalu
-  = belum mencapai target

Uraian atas tiga indikator tersebut di atas sebagai berikut:

### 7.1 Indikator Kegiatan 1

#### **Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan (APP)**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Direktorat Investigasi IV Tahun 2022 terdiri dari:

1) Pengendalian Kecurangan (APP 25)

Pengendalian Kecurangan merupakan salah satu tema APP, bagian dari sektor Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Pengendalian kecurangan terdiri dari 3 (tiga) topik, yaitu:

- a. Pencegahan Kecurangan (APP 81)
- b. Deteksi Kecurangan (APP 82)
- c. Respon Kecurangan (APP 83)

Ketiga topik tersebut menjadi PKPT tahun 2022.

2) Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Nasional.

3) Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.

4) Penilaian Risiko Kecurangan atas 23 topik APP:

- a. Penanganan Covid-19 Vaksinasi (APP 6).
- b. Penanganan Covid-19 Pengadaan Barang dan Jasa (alat testing/*tracing* almatkes, obat dan faskes) (APP 9).
- c. Penanganan Covid-19 Perubahan Perilaku, Komunikasi Publik dan Satu Data BLC (APP 10).
- d. Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya) (APP 17).
- e. Pengembangan Skema Perlinsos Adaptif (APP 18).
- f. Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja) (APP 19)
- g. Implementasi Bansos APBD (APP 20).
- h. Implementasi Bansos APBDesa (APP 21).
- i. Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun) (APP 22).
- j. Infrastruktur SPAM (APP 23)
- k. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) (APP 24).

- l. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (APP 40).
- m. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (APP 41).
- n. Optimalisasi PAD (APP 42).
- o. Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah) (APP 43).
- p. Penguatan Kualitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Papua dan Papua Barat) (APP 44).
- q. Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD) (APP 45).
- r. Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD) (APP 46).
- s. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (APP 47).
- t. Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa (APP 48).
- u. PILAR I-Komitmen Pemerintah (APP 84)
- v. PILAR II Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran (APP 85).
- w. PILAR III-Pemantauan dan Evaluasi (APP 86).

5) Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) didefinisi sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. HKP tidak termasuk dalam APP, namun mendukung sasaran strategis BPKP yang kedua, yaitu “Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional”. Selain itu penugasan terkait dengan HKP mengacu pada topik APP.

6) Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan (PAEP).

PAEP tidak termasuk dalam APP, namun merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Investigasi IV.

Realisasi indikator Kinerja Kegiatan Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan diukur dengan menghitung jumlah PKPT atas APP tahun 2022 dibagi dengan jumlah PKPT dikali 100,00%.

Realisasi indikator kinerja Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan sebesar 83,33% atau mencapai 83,33% dari target tahun 2022 sebesar 100,00%. Realisasi kinerja ini diperoleh dengan menghitung jumlah PKPT atas APP sebanyak 5 (lima) dibagi dengan jumlah PKPT sebanyak 6 (enam).

## 7.2 Indikator Kegiatan 2

### Persentase dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu

Laporan kinerja yang disusun oleh Direktorat Investigasi IV, sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal laporan
1	Laporan Kinerja Tahun 2021	5 Januari 2022
2	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022	14 April 2022
3	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022	10 Juli 2022
4	Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022	19 Oktober 2022

Realisasi indikator kinerja Persentase dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah laporan kinerja yang disusun tepat waktu (paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya) dibandingkan jumlah laporan kinerja yang disusun. Realisasi sebesar 50% atau mencapai 50% dari target tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan kinerja yang disusun tepat waktu

sebanyak 2 laporan dibandingkan dengan jumlah laporan kinerja yang disusun sebanyak 4 laporan.

### 7.3 Indikator Kegiatan 3

#### **Persentase dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu**

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat BPKP, terdapat rekomendasi berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Biro MKOT untuk menyeleraskan Renstra BPKP dengan isu strategis yang tertuang pada APP.
- 2) Dalam pengukuran kinerja, Direktorat Investigasi IV telah melakukan monitoring rencana aksi atas pencapaian kerjanya, tetapi belum terdapat mekanisme dan implementasi yang digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
- 3) Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) secara lebih serius, intensif, konsisten, melibatkan seluruh pegawai, dan memetakan inovasi pelayanan yang muncul di unit kerja.
- 4) Memantau realisasi atas rencana aksi dan melakukan evaluasi atas capaiannya.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaporkan pada Laporan *Self Assessment* atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022.

Realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebanyak empat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kinerja sebanyak empat. Realisasi sebesar 100%.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Direktorat Investigasi IV tahun 2022 sebesar Rp29.124.546.000,00 yang terdiri dari:

1. Dana dari Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan laboratorium komputer forensik merupakan anggaran untuk *Training Information Technology*, peningkatan kapabilitas dan kompetensi forensik, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal *software* sebesar Rp25.839.146.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.007.026.505,00 atau terserap 61,95%.
2. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp3.285.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.163.762.268,00 atau terserap 96,30%. Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.22 dan tabel 3.23.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Kegiatan**

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Pengawasan Investigasi IV	1.885.917.000,00	1.766.828.099,00	93,68
II	Program Dukungan Manajemen	1.399.483.000,00	1.396.934.169,00	99,82
III	Pengembangan Laboratorium Forensik	25.839.146.000,00	16.007.026.505,00	61,95
	Jumlah	29.124.546.000,00	19.170.788.773,00	85,15

**Tabel 3.23**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 menurut sasaran Program/  
 Sasaran kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan atas EPK K/L/D	0	0	0
2.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	161.842.000,00	139.207.598,00	86,01
3.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	1.724.075.000,00	1.627.620.501,00	94,41
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	1.399.483.000,00	1.396.934.169,00	99,82
5.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi	0	0	0
6.	Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputi Bidang Investigasi	0	0	0
7.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Investigasi	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3.285.400.000,00</b>	<b>3.163.762.2687,00</b>	<b>96,30</b>
	Pengembangan Laboratorium Forensik	25.839.146.000,00	16.007.026.505,00	61,95

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022**

Hasil pengukuran kinerja kegiatan Direktorat Investigasi IV atas tujuh sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 16 indikator kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa 15 indikator kinerja kegiatan telah mencapai target dan satu indikator kinerja belum mencapai target.

Faktor pendukung pencapaian kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Tim auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan pengawasan represif, preventif, dan edukatif sehingga dapat menyelesaikan penugasan dan penyelesaian laporan dengan tepat waktu.
2. Komitmen Deputi Bidang Investigasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern unit kerja dan melakukan inovasi layanan yang berdampak pada percepatan penugasan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Data dan informasi yang diperoleh tidak lengkap sehingga hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Rencana tindak pengendalian yang tidak dapat dilaksanakan karena jumlah SDM yang terbatas.

### **B. Rencana Tindak Tahun 2023**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Direktorat Investigasi IV akan melakukan:

1. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (APH dan K/L/P/BU) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mendukung tugas dan fungsi.
3. Pengembangan pengawasan intern dengan menggunakan teknologi informasi.
4. Memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang harus diambil yang menyangkut pemecahan masalah program prioritas pemerintah.

Akhirnya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Direktorat Investigasi IV bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.

**Kinerja Outcome Direktorat Investigasi IV  
Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2022				Keuangan			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Rencana	Realisasi	Capaian %
1	Pengawasan atas EPK K/L/D	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	6,00	23,00	383,33	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	79,00	16,00	20,25						
		Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	K/L	6,00	23,00	383,33						
		Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	Pemda	79,00	78,00	98,73						
2	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persen	100,00	100,00	100,00	1.885.917.000	1.766.828.099	93,69	1.680	2.400	142,86
3	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif	Persen	100,00	100,00	100,00	23.849.225.000	14.894.471.780	62,45	2.960	5.120	172,97
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	75,00	87,86	117,15	1.399.483.000	1.396.934.169	99,82	240	240	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2022				Keuangan			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Rencana	Realisasi	Capaian %
		Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00	1,00	100,00						
		Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan	Jumlah	1,00	2,00	200,00						
5	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	84,88	121,26	-	-	-	240	240	100,00
		Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100						
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputi Bidang Investigasi	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	50	100	200	-	-	-	240	240	100,00
		Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100	100	100						
7	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Investigasi	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100	83,33	83,33	1.989.921.000	1.112.554.725	55,91	880	1200	136,36

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Tahun 2022				Keuangan			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Rencana	Realisasi	Capaian %
		Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100	50	50						
		Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100	100	100						

**Perbandingan Kinerja Outcome Direktorat Investigasi IV  
Tahun 2021 dan 2022**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (turun)	Target 2024	% realisasi dari tahun 2024
1	Pengawasan atas EPK K/L/D	1	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	23	7	16	383,33	233,33	150,00	12	191,67
		2	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	16	17	- 1	20,25	170,00	- 149,75	157	10,19
		3	Jumlah K/L yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	K/L	23	7	16	383,33	233,33	150,00	12	191,67
		4	Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	Pemda	78	17	61	98,73	170,00	- 71,27	157	49,68
2	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	1.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persen	100,00	93,94	6,06	100,00	93,94	6,06	100,00	100,00
3	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	3.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif	Persen	100,00	100,00	-	100,00	133,33	- 33,33	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Investigasi	4.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	87,86	-	87,86	117,15	-	117,14667	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (turun)	Target 2024	% realisasi dari tahun 2024
		4.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00	-	1,00	100,00	-	100	-	-
		4.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan	Jumlah	2,00	-	2,00	200,00	-	200	-	-
5	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Investigasi	5.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	84,88	88,54	- 3,66	121,26	153,85	-32,59	80	106,10
		5.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	92,86	7,14	100,00	93	7,14	100	100,00
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen SDM pada Deputi Bidang Investigasi	6.1	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	100	-	100,00	200,00	-	-	-	-
		6.2	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100	-	100,00	100,00	-	-	-	-
7	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Investigasi	7.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	83,33	-	83,33	83,33	-	-	-	-
		7.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	50	-	50,00	50,00	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik (turun)	Capaian 2022	Capaian 2021	Naik (turun)	Target 2024	% realisasi dari tahun 2024
		7.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100	-	100,00	100,00	-	-	-	-